

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

**Oleh
NORCE SANTRINA OLLO
NIM 22310002**

Penggelapan terjadi ketika seseorang yang dengan sengaja mengambil hak milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya yang sebelumnya sudah menjadi kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi menggunakan untuk kepentingan pribadi atau menyalahgunakannya. permasalahannya adalah mengapa hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan?, mengapa hakim kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan?. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan untuk mengetahui alasan hakim kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan alasan hakim kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan tersier yang akan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan karena Perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana dimana terlihat adanya hubungan keperdataan sehingga Majelis Hakim menilai penyerahan uang penjualan tanah dari PT Sentul tersebut dari Saksi Hendra Hakim kepada Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. *Kedua*, alasan hakim kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan karena: Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, Terdakwa telah ada mens rea/niat jahat. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melanggar pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: barang siapa secara melawan hukum mengambil, Suatu benda atau barang, Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Saran dari penulis yaitu: pertama Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara seharusnya lebih cermat dalam mengkaji alat bukti dan hubungan para pihak sehingga tidak ada kekeliruan dalam membedakan perkara pidana dan perdata serta menerapkan ketentuan hukum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Kedua Masyarakat dan pelaku diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai tindak pidana penggelapan yang merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak pidana penggelapan, putusan hakim

ABSTRACT

Description of Judges' Considerations in Handing Down A Decision of Acquittal and Criminal Sentences Against Perpetrators of the Crime of Embezzlement

By

NORCE SANTRINA OLLO

NIM 22310002

Embezzlement occurs when someone intentionally takes the property of another person, either partially or completely, that was previously under their control, not through a crime, but uses it for personal gain or abuses it. The question is: why did the District Court judge hand down a decision of acquittal against the perpetrator of the crime of embezzlement? Why did the cassation judge overturn the District Court decision and sentence the perpetrator of the crime of embezzlement? The purpose of this study is to determine the reasons why the District Court judge handed down a decision of acquittal against the perpetrator of the crime of embezzlement and to determine the reasons why the cassation judge overturned the District Court decision and sentenced the perpetrator of the crime of embezzlement. The research method used in this study is normative research with a descriptive nature. The independent variable in the study of the reasons why the District Court judge issued an acquittal verdict against the perpetrator of the crime of embezzlement and the reasons why the cassation judge overturned the District Court decision and sentenced the perpetrator of the crime of embezzlement. and the dependent variable in this study is the judge's decision against the perpetrator of the crime of embezzlement. The data obtained in this study are primary materials, secondary materials and tertiary materials which will be analyzed qualitatively normatively. Based on the results of the study, it shows that: first, the reason why the District Court Judge issued an acquittal verdict against the perpetrator of the crime of embezzlement was because the defendant's actions were proven but not a criminal act where there was a civil relationship so that the Panel of Judges considered the transfer of land sales money from PT Sentul from Witness Hendra Hakim to the Defendant was not a criminal act but a civil act, so the Defendant must be released from all legal charges. Second, the reason why the cassation judge overturned the District Court decision and sentenced the perpetrator of the crime of embezzlement because: the District Court misapplied the law, the Defendant had mens rea/evil intent. The defendant's actions were legally proven and declared guilty of violating Article 372 of the Criminal Code with the following elements: whoever unlawfully takes, An object or goods, In whole or in part belonging to another person, Is in his power not because of a crime, The first suggestion The Panel of Judges who examined and decided the case should be more careful in reviewing the evidence and the relationship of the parties so that there is no error in distinguishing criminal and civil cases and applying legal provisions relevant to the legal facts revealed in the trial, Second The community and the perpetrators are expected to increase their understanding and legal awareness regarding the crime of embezzlement which is an unlawful act and can be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Keywords: Crime of embezzlement, judge's decision